

**PERAN PEMERINTAH NAGARI
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
DI NAGARI BATU BANYAK KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



OLEH :

KESY HARMEIN

18042070

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan
Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten
Solok

Nama : Kessy Harmein

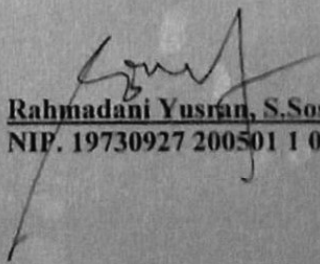
NIM : 18042070/ 2018

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Juni 2023

Disetujui Oleh
Pembimbing,


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.
NIP. 19730927 200501 1 004

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 08 Juni 2023 Pukul 11.00 – 12.00 WIB

Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di

Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok

Nama : Kessy Harmein
NIM : 18042070/ 2018
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 08 Juni 2023

Tim penguji :

Nama

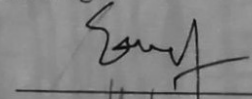
Ketua : : Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.

Anggota : : Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.

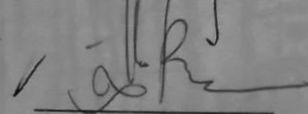
Anggota : : Adil Mubarak, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

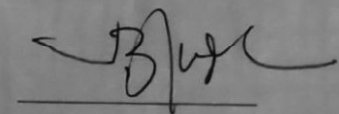
1.



2.



3.



Mengesahkan
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kessy Harmein
NIM/TM : 18042070/2018
Program Studi Ilmu : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Kessy Harmein
2018/18042070

ABSTRAK

KESSY HARMEIN 18042070 Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam mencegah dan menangani stunting di Nagari Batu Banyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan bagian Kesehatan Keluarga dan Gizi, Wali Nagari Batu Banyak, Sekretaris Nagari Batu Banyak, Kader KPM Nagari Batu Banyak, Bidan Nagari, dan Masyarakat sasaran penurunan stunting di Nagari Batu Banyak. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menjalankan perannya dalam pencegahan dan penanganan stunting di Nagari Batu Banyak pemerintah Nagari telah melaksanakan berbagai program yakni Posyandu, pos gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah nagari berperan dalam menyediakan anggaran sesuai yang diamanatkan dalam Perbup Solok Nomor 35 tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. Dana tersebut digunakan untuk pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan untuk PMT bagi Posyandu dan pos gizi, hingga honor kader. Namun demikian, peran pemerintah tersebut belum optimal terlaksana dikarenakan beberapa kendala berupa kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, SDA yang tidak memadai dan dana desa yang tidak mencukupi.

Kata kunci : Peran, Pemerintah Nagari, Stunting, Nagari Batu Banyak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan hormat dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ayah Harmein Radinis (Alm) dan Ibu Maryani selaku orang tua penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi, juga usaha dan do'a yang diberikan sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
2. Uda Hendro Eka Putra, Abang Romario Varia, Kakak Tari Febriani, dan Adik Nhayra Harmein, yang telah memberikan doa', semangat dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si. selaku Penguji Pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Adil Mubarak S.IP., M.Si. selaku Penguji Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen staff pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
10. Staff karyawan, karyawan perempuan keputakaan dan staff administratif Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
11. Para informan penelitian yang sudah berkenan membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Yogi Kadri Illahi yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman senasib dan seperjuangan, Endah Kurnia, Evi Triyanti Nazara, Indah Asvarini, Yola Oktaviana dan Yuliani Wahdini yang selalu bersama, saling mendukung dan memberi support selama perkuliahan, hingga selesainya skripsi ini.
14. Sahabatku, Florin Harfero, Cindy Andayani dan Resa Lailiani yang selalu memberi semangat dan kebersamaan yang sangat berharga bagi penulis.
15. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 18 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan yang telah kita jalin bersama.
16. Dan terakhir kepada diri sendiri yang sudah kuat berjuang dan bertahan sampai titik ini. Semoga bisa lebih kuat lagi untuk berjuang di masa yang akan datang.

Padang, Juni 2023

Kessy Harmein
18042070

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Konsep <i>Stunting</i>	14
2. Konsep Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i>	24
B. Kajian Penelitian yang Relevan	33
C. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian.....	39

C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Temuan Umum Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Temuan Khusus.....	54
1. Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok	54
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Pemerintah Nagari dalam Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok	70
C. Pembahasan.....	78
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	41
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk nagari Batu Banyak 2022.....	49
Tabel 4. 2 Penggunaan Lahan Nagari Batu Banyak.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Angka Prevalensi Stunting Nasional 2018-2020.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4. 1 Peta Nagari Batu Banyak.....	48
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Batu Banyak	53
Gambar 4. 3 Rincian Anggaran Belanja Dana Desa untuk Kegiatan Posyandu di Nagari Batu Banyak.....	58
Gambar 4. 4 Pemberian Edukasi di Pos Gizi.....	65
Gambar 4. 5 Pemberian Makanan Tambahan	65
Gambar 4. 6 Penimbangan Berat Badan Anak	66
Gambar 4. 7 Pengukuran Tinggi Anak.....	66
Gambar 4. 8 Pengukuran Lingkar Kepala Anak.....	67
Gambar 4. 9 Pengukuran Lingkar Lengan Anak.....	67
Gambar 4. 10 Pencatatan Hasil Ukur Perkembangan Anak	67
Gambar 4. 11 Daftar Hadir Pos Gizi	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu masalah gizi pada balita yang mendapat banyak perhatian berdasarkan indeks TB/U. *Stunting* menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa *stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. *Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami *stunting* bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik (Rahmadhita, 2020 : 226)

Prevalensi balita *stunting* di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi balita *stunting* terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 36,8%, 2010 sebesar 35,6%, dan 2013 menjadi 37,2%. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)

tahun 2017, prevalensi stunting telah mengalami penurunan menjadi 29,6% (Kementerian Kesehatan RI, 2018), namun angka tersebut masih cukup tinggi, sehingga pemerintah memasukkan program penurunan prevalensi balita stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Provinsi dengan prevalensi tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0-59 bulan tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah Bali (Pemantauan Status Gizi, 2017).



Gambar 1. 1 Angka Prevalensi Stunting Nasional 2018-2020

Hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting berada pada 27,67 persen pada tahun 2019. Walaupun angka stunting ini menurun, namun angka tersebut masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen (BKKBN, 2021). Sementara di Sumatera Barat tercatat prevalensi stunting pada tahun 2018 (30,8%) dari seluruh balita (Riskesdas, 2018). Dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok tercatat memiliki kasus stunting tertinggi nomor tiga dari Kabupaten/Kota lain

yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan angka 8334 kasus (31,12%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Pencegahan *stunting* merupakan program nasional yang didasarkan pada dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG). Lahirnya regulasi ini memperhatikan berbagai aspek dalam penuntasan *stunting* di Indonesia. Kebijakan ini kemudian menjadi ultimatum untuk desa-desa melalui Permenkeu 61/PMK.07/2019, yang menjadi landasan bagi desa-desa untuk melakukan pencegahan *stunting* (Rahman et al., 2021). Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Keseh'atan meliputi diantaranya arah dan tujuan perbaikan gizi masyarakat. Tujuan tersebut adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, melalui: a) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; b) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; c) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan d) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Tahun 2018, kebijakan penanggulangan *stunting* dilakukan melalui memprioritaskan 160 kabupaten/kota, dengan masing-masing 10 desa untuk penanganan *stunting*, di mana program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap I dilaksanakan pada tahun 2018, dengan jumlah kabupaten/kota prioritas sebanyak 100 kabupaten/kota, masing-masing kabupaten/kota terdiri dari 10 Desa, sehingga total desa berjumlah 1000 desa. Tahap II dilaksanakan tahun 2019, terdiri dari 60 kabupaten/kota prioritas dengan total jumlah desa 600. Setiap kementerian terkait diharuskan mengalokasikan program dan kegiatannya di 100

desa pada 10 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan stunting. Pihak terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Kementerian Kesehatan, dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) (Nisa, 2018).

Di samping itu, kementerian/lembaga (K/L) juga sebenarnya telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Adapun beberapa program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Program terkait intervensi dengan sasaran ibu hamil, yang dilakukan melalui beberapa program/kegiatan berikut:
 - a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
 - b) Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat
 - c) Program untuk mengatasi kekurangan iodium
 - d) Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil
 - e) Program untuk melindungi ibu hamil dari malaria

Jenis kegiatan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal meliputi pemberian suplementasi besi folat minimal 90 tablet, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, melakukan upaya untuk penanggulangan cacangan pada ibu hamil, dan memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.

2. Program yang menyoasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan, termasuk diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI jolong/colostrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada anak balitanya. Kegiatan terkait termasuk memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat.
3. Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan, dengan mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacang, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 22 ayat (1) sampai (4) dijelaskan mengenai koordinasi penyelenggaraan percepatan penanganan stunting di tingkat desa, yaitu :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Peran pemerintah desa sebagai wakil pemerintah di desa sangat penting dalam menanggulangi stunting di wilayahnya. Desa diharapkan dapat membuat program-program yang inovatif dalam mengatasi stunting di wilayahnya sesuai

dengan kemampuan sumber daya dan keuangan yang ada di desa. Contoh desa yang sudah melakukan perannya dalam pencegahan dan penanganan stunting diantaranya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali melalui Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan langsung ke 10 (sepuluh) desa di kabupaten Gianyar yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Desa–desa tersebut adalah desa Lebih, Siangan, Lodtunduh, Singakerta, Sanding, Manukaya, Pupuan, Taro, Kedisan dan Bresela. Sedangkan di Desa Senjayan, Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pemerintah Desa berinovasi dalam mencegah stunting atau kerdil di wilayahnya dengan program bernama Ceting E Abah Kolel. Program tersebut memanfaatkan bank sampah, pekarangan maupun kolam lele. Tujuan utamanya yaitu mengedukasi masyarakat dengan menanamkan kesadaran untuk memanfaatkan tanah pekarangan, seperti menanam sayur dan buah-buahan, pemeliharaan kolam lele skala rumah tangga, dan pengelolaan sampah yang benar untuk menghindari penyakit akibat sampah. Kemudian di desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah, pemerintahnya bersama UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas Kutowinangun melakukan kegiatan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka pencegahan stunting di desa tersebut.

Dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 dijelaskan peran pemerintah nagari dalam pencegahan dan penanganan atau penurunan stunting, yaitu :

- (1) Pemerintah nagari mempunyai peluang dan tantangan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dengan memanfaatkan Dana Desa untuk pembiayaan kegiatan intervensi sensitif dan spesifik
- (2) Pemanfaatan dana desa untuk pembiayaan kegiatan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk beberapa kegiatan prioritas berikut :
 - a. Air bersih secara berskala;
 - b. Sanitasi lingkungan;
 - c. Bantuan insentif kader kesehatan/Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - d. Pelatihan (peningkatan pengetahuan dan keterampilan) kader kesehatan masyarakat;
 - e. Transport kader kesehatan;
 - f. Perawatan dan/atau pendamping ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui;
 - g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah;
 - h. Pengadaan, pembangunan, penegembangan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pembinaan UKBM (Poskesdes/Polindes, Posbindu, Posyandu dan Pos Kesehatan lainnya);
 - i. Penyelanggaran dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan

- j. Kampanye dan promosi hidup sehat (peningkatan PHBS) guna mencegah penyakit menular dan tidak menular.

Sementara itu di daerah Sumatera Barat sendiri juga sudah banyak desa yang melakukan perannya dengan baik dalam penanganan stunting. Diantaranya ada Desa Talawi Mudiak Kota Sawahlunto, yang menurunkan angka stunting melalui rumah gizi, posyandu dan kunjungan dari rumah ke rumah. Rumah gizi dengan nama 'Ragi Canting' atau rumah gizi cegah stunting itu menjadi tempat memasak dan memberikan makanan bergizi dan bervitamin tinggi terhadap sasaran yakni anak-anak stunting dan rawan stunting. Lalu Pemerintah Kabupaten Solok melalui TP-PKK juga membangun Pos Gizi Kasih di Kantor Jorong Koto Gadang Nagari Talang, yang juga merupakan langkah untuk menekan angka stunting di daerah tersebut. Di nagari Paninggahan, Kabupaten Solok, pemerintah di nagari tersebut juga sudah menjalankan perannya dalam pencegahan dan penanganan stunting, mulai dari pemberian makanan bergizi, hingga pengadaan saluran air bersih dari Batang Gagoan.

Berdasarkan temuan awal, peran pemerintah nagari dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Nagari Batu banyak belum optimal, dilihat dari peran-peran yang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut :

Pertama, peran pemerintah nagari dalam penurunan *stunting* melalui penyediaan air bersih secara berkala belum terlaksana. Hal ini dikarenakan air yang fasilitasnya sudah dibangun oleh pemerintah seringkali tidak tersedia. Tidak tersedianya air bersih secara terus menerus disebabkan oleh dana desa yang tidak

memadai untuk melaksanakan peran pemerintah tersebut. Ini mengakibatkan masyarakat masih menggunakan air yang tidak layak untuk kegiatan sehari-hari seperti MCK dan juga kebutuhan konsumsi.

Kedua, peran pemerintah nagari dalam penurunan *stunting* melalui sanitasi lingkungan belum optimal terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas MCK yang tidak sehat, seperti masyarakat yang masih buang air bahkan sampah ke sungai yang merupakan sumber air untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan sanitasi lingkungan tersebut belum terlaksana dengan baik di Nagari Batu banyak karena minimnya anggaran yang tersedia. Tidak terlaksananya sanitasi lingkungan yang baik menjadi salah satu penyebab angka *stunting* masih ada di nagari ini.

Ketiga, program PMT yang dilaksanakan tidak tepat sasaran. Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang dilaksanakan baik di Posyandu maupun Pos gizi itu tidak tepat sasaran, karena yang mengkonsumsi makanan yang diberikan bukanlah anak yang menjadi target dari program tersebut. Ini tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program tersebut .

Keempat, peran pemerintah dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat guna mencegah penyakit menular dan tidak menular masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat dari pola hidup masyarakat yang tidak bersih seperti pembuangan dan pengelolaan sampah yang tidak sehat dan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Pola hidup masyarakat yang seperti ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

PHBS yang seharusnya disosialisasikan terhadap masyarakat melalui penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh nagari. Selain kurangnya promosi kesehatan dan PHBS, ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, yang sudah mengetahui namun tidak melakukannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan tentang bagaimana pemerintah Nagari Batu Banyak menjalankan perannya dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di nagari tersebut. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Peran Pemerintah Nagari dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Nagari Batu Banyak Kabupaten Solok.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah :

1. Peran pemerintah dalam pengadaan air bersih berskala desa yang belum terlaksana.
2. Peran pemerintah dalam sanitasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Program PMT yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
4. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat masih belum optimal.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan : Pertama, air bersih berskala desa yang belum terlaksana. Kedua, penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi dan gerakan masyarakat hidup sehat guna mencegah penyakit menular dan tidak menular masih belum optimal.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Nagari Batu Banyak?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam pencegahan dan penangan *stunting* di Nagari Batu Banyak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di nagari Batu Banyak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran pemerintah nagari dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Nagari Batu Banyak.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bidang sejenis, dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang

terkait dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Pemerintahan Nagari/Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Organisasi

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan umum tentang peran pemerintah nagari dalam penanganan dan pencegahan *stunting*.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai tambahan informasi, baik bagi peneliti lanjutan dan lain sebagainya.
- 4) Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah karena terkait peran pemerintah dalam perannya mencegah dan menagani *stunting*.